

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Kecurangan atau dalam istilah akuntansi disebut *fraud* tidak hanya terjadi pada sektor swasta atau publik saja, tetapi juga bisa terjadi di sektor pendidikan (Bolin, 2004). ACFE Indonesia (2020) menjelaskan bahwa sektor pendidikan berada di urutan ke 9 dalam jenis industri yang paling dirugikan karena *fraud*. Kasus kecurangan akademik merupakan masalah di semua tingkat pendidikan, meskipun sudah sangat lazim di lembaga pendidikan terutama di perguruan tinggi. Perilaku kecurangan akademik ditakutkan akan menumbuhkan benih-benih kecurangan yang lebih besar di masa depan terutama di dunia kerja jika dilakukan secara terus menerus (Deliana *et al.*, 2017). Rangkuti (2011) menyatakan bahwa kecurangan akademik adalah perilaku yang menampilkan ketidakjujuran dengan tujuan memperoleh keinginan pelaku kecurangan. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang ditemukan berorientasi pada nilai sehingga mengarah ke berbagai taktik kecurangan akademik.

Salah satu contoh kecurangan akademik yang masih sering ditemukan dalam sektor pendidikan ialah mencontek dan plagiasi. Seperti yang terjadi di Universitas Harvard yang menghukum 60 mahasiswanya yang terlibat kasus kecurangan pada ujian akhir. Kejadian ini terungkap pada saat ujian dimana sebanyak 125 mahasiswa strata 1 mengumpulkan hasil tugas yang mirip satu sama lain (Permesti & Mardiani, 2013). Di Institut Teknologi Bandung di Indonesia, kasus kecurangan akademik berupa plagiarisme juga terjadi pada tahun 2009 (Fajarhati, 2010).

Kecurangan akademik juga terjadi di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Madura. Hal ini didukung oleh temuan Puspita *et al.* (2015) yang melakukan penelitian pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) “Hitam Putih”. Penelitian tersebut memberikan bukti sisi gelap pengelolaan keuangan UKM dengan menaikkan biaya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, penelitian ini menunjukkan aspek negatif pengelolaan keuangan UKM, termasuk metode penyelewengan aset dan penggantian biaya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Madura. Diperlukan tindak pencegahan agar kasus-kasus kecurangan akademik di dunia pendidikan dapat dimitigasi dan dieliminasi. Salah satu upaya yang efektif berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah kecurangan ialah *whistleblowing* (Kaplan & Schultz, 2007).

Whistleblowing telah menarik perhatian seluruh dunia setelah diterbitkannya Sarbanes-Oxley Act (2002). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak perusahaan besar yang terlibat kecurangan dan akhirnya terungkap (Rachagan & Kuppusamy, 2013). Di Indonesia *whistleblowing* juga diterapkan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini dilakukan dengan diterbitkannya Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2008. Dengan diterbitkannya pedoman tersebut diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan untuk membangun, menerapkan serta mengelola suatu sistem pelaporan pelanggaran.

Sistem *whistleblowing* juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kecurangan akademik dengan mendorong mahasiswa untuk melaporkan sebayanya yang melakukan kecurangan pada pihak yang bisa melakukan tindakan seperti dosen (Near & Miceli 1985). Bowden (2013) dan

Harahap *et al.* (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing* dianggap menjadi salah satu teknik paling efisien yang dapat digunakan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Penerapan *whistleblowing* di perguruan tinggi diharapkan dapat menginspirasi keberanian calon *whistleblower* untuk mengungkapkan perilaku yang mengarah pada kecurangan sehingga lingkungan kampus menjadi bebas dari kecurangan akademik.

Dibalik pentingnya penerapan *whistleblowing* pada perguruan tinggi, masih terdapat beberapa kekurangan dimana sistem ini tidak dapat berdiri sendiri. Nayir & Herzig (2012) menyatakan bahwa ketakutan pelaporan tidak akan ditindaklanjuti menjadi alasan individu tidak melakukan *whistleblowing*. Ketakutan atas pengucilan juga menjadi faktor yang mengurangi niat individu untuk melakukan *whistleblowing* (Bjørkelo *et al.*, 2008). Maka dari itu pihak perguruan tinggi perlu memberikan keamanan bagi para calon *whistleblower* agar mereka lebih berani untuk mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh temannya. Hal ini didukung oleh *rational choice theory* yang menyatakan bahwa individu akan melakukan sesuatu hal yang bersifat rasional dimana individu akan melakukan sesuatu jika dirinya merasa aman (Jenkel & Haen, 2012).

Keamanan karenanya menjadi aspek yang esensial agar nantinya calon *whistleblower* dapat mengungkapkan kecurangan tanpa adanya rasa takut. Penguatan sistem di sini bisa dilakukan misalnya dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* (anonim) (Kaplan *et al.*, 2012) dan juga bisa dengan lebih mengkondisikan lingkungan sekitar agar nantinya calon *whistleblower* merasa aman dan tidak merasa takut (Dalton & Radtke, 2013). Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk memfokuskan penelitian ini pada beberapa variabel seperti *microsocial ethical environment*, saluran pelaporan anonim, dan *perceived*

personal cost yang didasarkan atas *rational choice theory*. *Rational choice theory* memberikan petunjuk bahwa proses etis untuk melakukan *whistleblowing* merupakan proses kompleks yang mana calon *whistleblower* mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan pelaporan (Elster, 1989).

Penelitian kali ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang ingin menguji kembali variabel yang memberikan temuan beragam, seperti *microsocial ethical environment* (Lee & Fargher, 2013; Dalton & Radtke, 2013; Taripudin & Umar, 2020), saluran pelaporan anonim (Kaplan & Schultz, 2007; Ayers & Kaplan, 2005; Gao *et al.*, 2015; Park *et al.*, 2014) dan *perceived personal cost* (Callahan & Collins, 1992; Cho & Song 2015; Kennett *et al.*, 2010; Keenan 2002). Dari beberapa penelitian sebelumnya menghasilkan temuan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *whistleblowing*. Terdapat beberapa penelitian yang kontradiktif dengan teori seperti penelitian yang dilakukan Ahyaruddin & Asnawi (2017) yang menyatakan bahwa *ethical environment* tidak berpengaruh signifikan terhadap *whistleblowing*. Jenkel & Haen (2012) dan Kaplan *et al.* (2009) memberikan bukti empiris bahwa saluran pelaporan anonim tidak berpengaruh signifikan terhadap *whistleblowing*. Park *et al.* (2005) dan Winardi (2013) juga menyatakan bahwa *personal cost* atau retaliasi bukan merupakan faktor yang memengaruhi niat melakukan *whistleblowing*.

Kecurangan akademik masih menarik untuk diteliti kembali. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk menguji kembali ketiga variabel tersebut (*microsocial ethical environment*, saluran pelaporan anonim, dan *perceived personal cost*). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini peneliti menambahkan tipe *peer-reporting* sebagai variabel moderasi untuk memperkuat ketiga variabel independen yang

terjadi inkonsistensi pada penelitian sebelumnya (Baron & Kenny, 1986). Tipe *peer-reporting* merupakan konsep kebijakan pelaporan untuk melaporkan sebayanya, penelitian ini merupakan studi pertama yang menggunakan tipe *peer-reporting* sebagai variabel moderasi. Variabel tipe *peer-reporting* sebagai variabel moderasi didasari oleh *grid-group cultural theory* yang dikemukakan oleh Loyens (2013a). Loyens (2013a) hanya menjelaskan *grid-group cultural theory* dalam tataran konseptual, namun penelitian kali ini mencoba menjadikannya sebagai instrumen penelitian untuk melihat kebijakan seperti apa yang cocok untuk diterapkan pada instansi perguruan tinggi di Madura yang bisa diimplementasikan di kalangan mahasiswa. Menurut Loyens (2013a) *peer-reporting* dibagi ke dalam empat tipe, yaitu fatalisme, hierarki, individualisme, dan egalitarianisme yang bisa dijadikan sebagai alternatif kebijakan dalam pelaporan *peer-reporting*.

Penelitian ini difokuskan kepada mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi yang berada di Perguruan Tinggi di Madura. Mahasiswa S1 Akuntansi dipilih sebagai responden karena menurut penelitian yang pernah dilakukan Burke *et al.* (2007) menyatakan bahwa kasus kecurangan akademik banyak terjadi di jurusan akuntansi yang merupakan salah satu unsur pendorong terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan di dunia kerja. Hal ini juga didukung oleh Forbes (2014) yang menyatakan kasus kecurangan akademik paling banyak yang terjadi di bagian akuntansi yakni sebesar 17,8%. ACFE Indonesia (2020) menjelaskan bahwa lulusan sarjana merupakan pelaku *fraud* paling banyak di Indonesia yakni sebesar 73,3% dibandingkan dengan latar belakang pendidikan pelaku *fraud* lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita *et al.* (2015) juga menjadi alasan kuat peneliti tertarik untuk memilih responden tersebut.

Topik *whistleblowing* di dunia pendidikan juga masih menarik untuk diteliti karena terbatasnya penelitian di bidang ini. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait *whistleblowing* di dunia pendidikan antara lain Harahap *et al.* (2020), Lakaba *et al.* (2022), Zarefar *et al.* (2018), Chaudhary *et al.* (2019) dan Owusu *et al.* (2020). Peneliti karenanya mencoba menambah kajian empiris terkait *whistleblowing* di dunia pendidikan, berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian kali ini mengambil judul **“Moderasi Tipe *Peer-Reporting* Pada Pengaruh *Microsocial Ethical Environment*, Saluran Pelaporan, dan *Perceived Personal Cost* Terhadap Intensi *Whistleblowing*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *microsocial ethical environment* berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal?
- 2) Apakah saluran pelaporan anonim berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal?
- 3) Apakah *perceived personal cost* berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal?
- 4) Apakah tipe *peer-reporting* memoderasi pengaruh *microsocial ethical environment* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal?
- 5) Apakah tipe *peer-reporting* memoderasi pengaruh saluran pelaporan anonim terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal?
- 6) Apakah tipe *peer-reporting* memoderasi pengaruh *perceived personal cost* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *microsocial ethical environment* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal.
- 2) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh saluran pelaporan anonim terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal.
- 3) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *perceived personal cost* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal.
- 4) Untuk memberikan bukti empiris efek moderasi tipe *peer-reporting* pada pengaruh *microsocial ethical environment* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal.
- 5) Untuk memberikan bukti empiris efek moderasi tipe *peer-reporting* pada pengaruh saluran pelaporan anonim terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal.
- 6) Untuk memberikan bukti empiris efek moderasi tipe *peer-reporting* pada pengaruh *perceived personal cost* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* internal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian kali ini dapat memberikan bukti aplikasi *rational choice theory* dan *grid-group cultural theory*. Penelitian ini juga mampu memberikan bukti empiris pengaruh *microsocial ethical environment* dan *perceived personal cost* terhadap niat melakukan *whistleblowing* internal serta pengaruh saluran pelaporan anonim terhadap intensi *whistleblowing* yang

dimoderasi tipe *peer-reporting*. Serta dengan adanya temuan penelitian ini dapat menambah kajian empiris *whistleblowing* di dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian kali ini dosen dapat lebih mendorong mahasiswanya untuk melakukan *peer-reporting* dengan menggunakan kebijakan hierarki yang mengacu pada *grid-group cultural theory*. Bagi mahasiswa dengan adanya penelitian ini mereka lebih terdorong untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh teman sebayanya.

3. Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini pihak rektorat atau pihak perguruan tinggi di Madura dapat mengembangkan serta menggunakan kebijakan hierarki yang cocok digunakan untuk perguruan tinggi tersebut mengacu pada *grid-group cultural theory*.